

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dari penelitian ini mengenai pengaruh belanja daerah, PDRB Perkapita, Aglomerasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pembangunan di kabupaten/ kota Provinsi Sumatera Barat periode 2013-2022, maka dapat disimpulkan:

- 1) Dari hasil estimasi pengujian data panel bahwa model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model* (REM)
- 2) Belanja Daerah berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan. Artinya peningkatan realisasi Belanja Daerah akan ikut meningkatkan Ketimpangan Pembangunan di daerah Sumatera Barat.
- 3) PDRB Perkapita berkorelasi negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan. Hal tersebut membuktikan bahwa PDRB Perkapita memiliki peran yang sangat penting dalam menurunkan ketimpangan Pembangunan di daerah Sumatera Barat.
- 4) Aglomerasi berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan, yang tentunya akan mempengaruhi peningkatan ketimpangan Pembangunan di daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pembangunan kualitas manusia sangat diperlukan di setiap daerah dalam menurunkan ketimpangan di daerah Provinsi Sumatera Barat.

5.2 Saran

- 1) Dengan adanya ketimpangan yang masih ada di Provinsi Sumatera Barat, tindakan yang diambil oleh pemerintah, seperti memperluas pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah desa dan mengalokasikan dana desa sejak tahun 2015, adalah langkah yang positif. Namun, penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dan penggunaan alokasi anggaran dapat memberikan dampak pengembangan yang besar dan inklusif kepada semua segmen masyarakat. Hal ini memerlukan pengawasan yang teliti. Dalam hal realisasi belanja daerah, pemerintah dapat membantu warga secara langsung. Bantuan Langsung dapat diberikan langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk bantuan dana. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan bantuan berupa modal, seperti pinjaman dengan bunga yang lebih rendah.
- 2) Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di Sumatera Barat, pemerintah diharapkan dapat membantu menciptakan lapangan kerja bagi Masyarakat dan mengembangkan ekonomi kreatif. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
- 3) Pemerintah diharapkan mampu memfasilitasi dalam mobilitas barang dan jasa antar daerah. Selain itu, penting untuk membangun infrastruktur yang memadai dan merata. Tidak hanya terfokus pada daerah perkotaan, pembangunan infrastruktur yang memadai di daerah terpencil juga sangat penting guna meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup penduduk.
- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak terlepas dari bagaimana kualitas SDM di suatu daerah. Oleh karena itu, dalam peningkatan kualitas SDM, pemerintah bisa mulai dengan meningkatkan fasilitas yang dapat mendorong peningkatan tersebut seperti memberikan layanan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Peningkatan akses terhadap layanan juga memberikan dampak positif terhadap IPM seperti layanan dasar air bersih, sanitasi, perumahan yang layak, dan energi yang terjangkau.